

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kondisi Pendidikan di Kabupaten Lebak dalam Penanganan Anak Putus Sekolah: Kabupaten Lebak, khususnya dalam konteks Program Indonesia Pintar (PIP), menunjukkan masih adanya tantangan besar dalam menangani anak putus sekolah. Berbagai kendala, seperti ekonomi masyarakat yang rendah, akses geografis yang sulit, serta infrastruktur pendidikan yang belum merata, memperumit upaya peningkatan mutu pendidikan. Meski demikian, semangat dan harapan dari masyarakat dan pihak sekolah untuk meningkatkan taraf pendidikan anak-anak tetap tinggi. PIP hadir sebagai salah satu upaya pemerintah untuk membantu anak-anak yang berisiko putus sekolah, namun pelaksanaannya masih membutuhkan peningkatan untuk mencapai efektivitas yang lebih optimal.
2. Evaluasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.10 Tahun 2020 dalam Program Indonesia Pintar di Kabupaten Lebak: Evaluasi terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.10 Tahun 2020 menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan dampak positif dengan memberikan bantuan dana bagi siswa dari keluarga kurang mampu, bertujuan meringankan beban ekonomi dan mendorong anak-anak untuk tetap bersekolah. Namun, dalam praktiknya, program ini menghadapi tantangan seperti sosialisasi yang kurang menyeluruh, mekanisme distribusi yang belum optimal, serta pengawasan yang masih terbatas.

Berdasarkan evaluasi, perbaikan dalam hal koordinasi antar pemerintah daerah dan pusat serta pelatihan bagi petugas pelaksana menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Program Indonesia Pintar di Kabupaten Lebak: Terdapat beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Kabupaten Lebak, di antaranya dukungan pemerintah daerah, antusiasme masyarakat, serta partisipasi sekolah yang aktif membantu siswa kurang mampu. Pemerintah daerah memberikan alokasi anggaran yang cukup serta kebijakan lokal yang sejalan dengan program nasional, sementara dukungan masyarakat mendorong keberlanjutan program. Namun, kendala seperti infrastruktur pendidikan yang terbatas, kemiskinan, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan menjadi tantangan yang signifikan. Selain itu, masih ada kendala dalam koordinasi antar-lembaga dan kurangnya pelatihan bagi pelaksana program, yang berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran bantuan. Secara keseluruhan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.10 Tahun 2020 tentang PIP telah menunjukkan dampak positif, namun perlu dioptimalkan agar lebih efektif menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kebijakan Program Indonesia Pintar di Kabupaten Lebak, berikut beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas program ini:

- C. Peningkatan Sistem Pengawasan dan Evaluasi: Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Indonesia Pintar di lapangan. Pengawasan yang ketat dan evaluasi yang dilakukan secara berkala akan memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan dapat meminimalisir kesalahan dalam distribusi bantuan kepada siswa yang membutuhkan.
- D. Pengembangan Kapasitas Pelaksana Program: Penting untuk melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pelaksana program di tingkat daerah. Pelatihan ini akan membantu petugas di lapangan memahami dan menjalankan program dengan lebih efektif dan akurat, sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam proses administrasi dan penyaluran.
- E. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder: Melibatkan masyarakat dan stakeholder terkait dalam implementasi program sangat penting. Partisipasi aktif masyarakat, termasuk orang tua dan komunitas lokal, dapat membantu keberlanjutan program serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Selain itu, bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi non-pemerintah akan memberikan dukungan tambahan bagi anak-anak yang berisiko putus sekolah.